

## **Abstrak**

Ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka ketentuan tentang pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legisltif mendatang. Hal ini menjadi sebuah perdebatan di berbagai kalangan. Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif ditentang oleh pemerintah, Bawaslu dan DPR. Penolakan tersebut terjadi dikarenakan KPU dianggap melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Larangan mantan narapidana menjadi anggota legislatif menuai banyak polemik disaat KPU menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang kemudian digugat di Makamah Agung dan pertimbangan MA mengabulkan gugatan para termohon tersebut karena bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Mantan Narapidana, Putusan Makamah Agung

## *Abstrak*

*The stipulation of PKPU Number 20 of 2018 concerning the Nomination of Members of the DPR, Provincial DPRD and Regency/Municipal DPRD, then the provisions concerning the prohibition of ex-corruption convicts from registering as candidates for the upcoming legislative members. This has become a debate in various circles. The General Election Commission's (KPU) move to prohibit former corruption convicts from becoming legislative candidates was opposed by the government, Bawaslu and the DPR. The refusal occurred because the KPU was deemed to have violated the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections. The ban on ex-convicts from being members of the legislature sparked a lot of polemic when the KPU issued PKPU Number 20 of 2018 which was later sued at the Supreme Court and the Supreme Court's consideration granted the defendants' claim because it was contrary to a higher law.*

*Keywords:* General Election, Former Convicts, Supreme Court Decision